



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI; 2. Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Kemenristekdikti RI; 3. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Kemenristekdikti RI; 4. Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI.
Hari/Tanggal	: Jumat, 18 September 2015.
Pukul	: 17.00 – 22.45 WIB.
Tempat	: Grand Kemang Hotel, Jakarta
Pimpinan Rapat	: Ir.H. Nuroji/Wakil Ketua Komisi X DPRRI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPRRI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA K/L 2016; 2. Lain-lain.
Hadir	: 33 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 17.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. H.Nuroji, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, dan Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

- A. Mengingat beberapa program prioritas belum dialokasikan anggarannya pada RAPBN TA 2016, Komisi X DPR RI belum dapat menyetujui pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 untuk:
1. Ditjen Pembelajaan dan Kemahasiswaan Rp6.062.976.061.000,-
 2. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Rp 939.920.000.000,-
 3. Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Rp1.436.981.771.000,-
 4. Ditjen Penguatan Inovasi Rp 90.608.900.000,-
- B. Dalam rangka meningkatkan akses, mutu, dan rasionalitas penganggaran, Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk beberapa hal antara lain:
1. Perlu membuat kebijakan beasiswa yang lebih berimbang antardaerah yang salah satunya melalui program beasiswa dasar dan/atau beasiswa afirmasi untuk daerah-daerah tertentu.
 2. Kuota penerima beasiswa bidikmisi di masing-masing wilayah harus menggunakan kriteria dasar dan afirmasi, meninjau ulang satuan biaya beasiswa bidikmisi dan mekanisme penyalurannya di salurkan setiap tiga bulan.
 3. Mengajukan usulan untuk meningkatkan jumlah pagu dan penerima beasiswa PPA baik untuk mahasiswa di PTN maupun PTS, beasiswa dan PPG SM3T, beasiswa dosen S2/S3, dan akreditasi program studi dan institusi.
 4. Mengajukan usulan anggaran yang belum dianggarkan antara lain yaitu:
 - a) SNMPTN dan SBMPTN.
 - b) Program pengabdian kepada masyarakat.
 - c) Program pembinaan PTS.
 - d) Program kegiatan kemahasiswaan di PTN, Politeknik, dan Kopertis.
 - e) Program desa inovasi.
 - f) Sarpras PTN.
 - g) Program profesi keinsinyuran.
 5. Untuk memenuhi amanat UU Guru dan Dosen dan meningkatkan akses, program-program di LPTK diprioritaskan untuk program pembangunan ruang kuliah dan asrama PPG.
- C. Program kerja sama yang menggunakan PHLN harus diinformasikan terlebih dahulu kepada Komsu X DPR RI berkaitan dengan dana pendampingan.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 16.15 WIB.

KETUA,



IR. H. NUROJI